

SKRIPSI

NUNGKY WARAS SETYARINI

SURAT PAKSA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM PENAGIHAN PAJAK



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001

SURAT PAKSA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM PENAGIHAN PAJAK

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Soehirman Djamal, S.H., M.S.

NIP. 130 675 522

Penyusun,



Nungky Wara Setyarini

NIM. 039714541

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2001**

Panitia Penguji Skripsi :

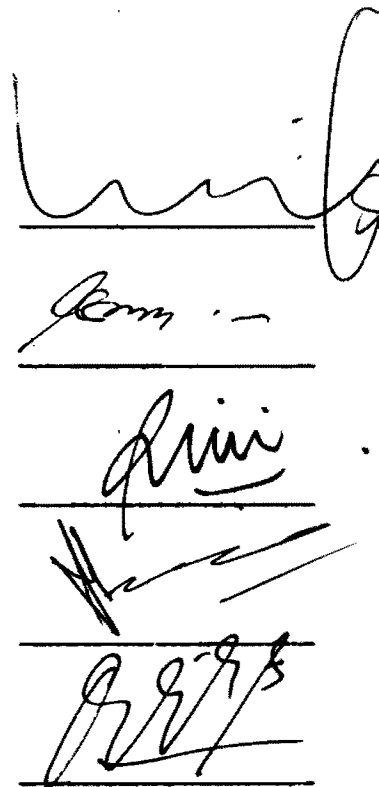
Ketua : Urip Santoso, S.H., M.H.

Anggota : 1. H. Soehirman Djamal, S.H., M.S.

2. Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.

3. Sumardji, S.H., M.Hum.

4. Lilik Pudjiastutik, S.H., M.H.



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak c.q. KPP agar wajib pajak membayar utang pajak dan biaya penagihannya dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, mengusulkan pencegahan dan melaksanakan penyanderaan. Surat Paksa berkepalanya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan mempunyai kedudukan yang sama seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Surat Paksa tidak dapat ditentang isi materialnya dengan jalan atau sarana hukum apapun karena keadilanlah yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan tersebut. Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu upaya dalam pelunasan utang pajak. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan apabila wajib pajak tidak membayar lunas utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah

dikirimkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

- b. Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Namun apabila jurusita pajak tidak menjumpai wajib pajak, maka salinan surat paksa tersebut dapat diserahkan kepada anggota keluarga atau pengurus perusahaan yang telah dewasa dan sehat akal. Pada saat menyampaikan Surat Paksa, tak jarang jurusita pajak mengalami masalah, diantaranya adalah wajib pajak menolak untuk menerima Surat Paksa tersebut. Disini jurusita pajak menggunakan pendekatan secara personal dengan harapan wajib pajak bersedia menerima Surat Paksa tersebut serta membayar utang pajaknya. Namun apabila wajib pajak tetap menolak Surat Paksa tersebut, maka jurusita pajak akan meninggalkan Surat Paksa di tempat tinggal wajib pajak dan mencatatnya dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bahwa wajib pajak tidak bersedia menerima Surat Paksa tersebut.

2. SARAN

- a. Hendaknya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak demi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara dapat lebih ditingkatkan. Selain itu pula, hendaknya ada koordinasi yang baik antara wajib pajak dengan fiskus agar tidak terjadi penagihan pajak ganda.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat ditempuh dengan cara pendekatan secara personal seperti yang telah dilakukan oleh KPP Surabaya Krembangan. Melalui pendekatan tersebut telah terbukti bahwa wajib pajak lebih dapat menerimanya daripada harus melaksanakan *law enforcment* di bidang perpajakan.